

TAHUN 2024 DAPAT ALOKASI 9.642.000 KG

Oktober, Penebusan Pupuk Urea Baru 54,03 Persen

SLEMAN (KR) - Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 9.642.000 kg urea dan 7.516.000 NPK. Hingga Oktober 2024, realisasi penebusan urea baru sebesar 5.209.260 kg atau 54,03% dan realisasi penebusan NPK sebesar 4.147.550 kg atau 55,18%.



KR-Istimewa

Petani Sleman sangat membutuhkan subsidi pupuk untuk tanaman padi mereka.

Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono di kantornya, Kamis (5/12). Menurutnya, Kementerian Pertanian melalui keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/ RC.210/

B/01/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani telah menetapkan bahwa untuk pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan melalui penebusan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau

Kartu Tani/ Kartu Tani Digital.

"Mulai 8 Oktober 2024, transaksi pupuk subsidi dapat dilakukan menggunakan mesin MPos. Petani dapat menebus pupuk subsidi dengan kartu tani atau KTP. Dengan integrasi ini diharapkan petani lebih mudah menebus pupuk subsidi dan bisa meningkatkan realisasi penebusan pupuk subsidi di Kabupaten Sleman," jelasnya.

Suparmono menegaskan, DP3 Sleman berupaya untuk mendorong petani menebus pupuk subsidi demi tercapainya peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan produksi dan kemandirian pangan. DP3 Sleman juga telah melakukan entri data usulan penerima pupuk bersubsidi dengan mengerahkan petugas PPL dan admin eRDKK. Sejauh ini, petugas telah mengentri sebanyak sekitar 40.595 NIK petani dalam aplikasi eRDKK 2025.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah NIK petani penerima subsidi pupuk tahun 2024 yakni sebanyak 53.764 petani, maka capaiannya sudah mencapai

75,5%," ungkapnya.

Menurutnya, capaian luasan yang sudah terentri

mencapai 35.568,499 Ha atau 75,08% dari luasan usulan tahun sebelumnya.

Tahun 2024, Sleman berhasil mengusulkan pupuk subsidi untuk luasan

47.373,032 Ha, usulan urea sebanyak 10.792.084 kg dan 12.113.293 kg NPK. (Has)-f

Bank BPD DIY Serahkan CSR Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Kabupaten Bantul dan Kalurahan Mangunan

BANTUL (KR) - Bank BPD DIY menyalurkan CSR PT Bank BPD DIY di Kabupaten Bantul, berupa 1 Unit Mobil Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul senilai Rp.195.400.000 dan 1 Unit Mobil Ambulans untuk Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo senilai Rp.150.000.000. Sehingga total penyaluran CSR PT Bank BPD DIY di Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.148.370.600.

Acara penyerahan dilakukan Pemimpin Cabang Bank BPD DIY Bantul Fendi Muryawan di Pendapa Mangala Parasamya Komplek Perkantoran Pemda II Bantul Manding, Kamis (5/12), dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hermawan Setiaji, perwakilan dari Kejari, Polres DPRD Bantul, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sri Nuryanti, semua Bhabin-katibmas, Panewu dan Lurah se Kabupaten Bantul. Menurut Fendi, latar belakang pemberian CSR ini adalah sebagai bentuk apresiasi atas implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan transaksi digital di Kalurahan

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT. Bank BPD DIY Cabang Bantul, yaitu :

- CMS (Cash Management System) digunakan untuk transaksi belanja daerah 100% dilaksanakan melalui transaksi non tunai sesuai amanat Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 tentang Hal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa.
- Penerimaan Pajak dan Retribusi dilakukan melalui non tunai dengan kanal digital (E-Retribusi dan QRIS).
- Semua Kalurahan se-Kabupaten Bantul telah menggunakan Siskeudes Digdaya sesuai amanat Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.3/0179/BPD, tanggal 8 Januari 2024 tentang Hal Mekanisme Implementasi Siskeudes Link Pada Kabupaten/Kota.
- Semua Bumdes se-Kabupaten Bantul telah menjadi Agen Laku Pandai PT.



KR-Judiman

Penyerahan mobil simbolis kepada Pemkab Bantul

Bank BPD DIY. ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) di Kabupaten Bantul di Semester I Tahun 2024 telah mencapai 97% dan masuk dalam kategori tahap Digital.

PT. Bank BPD DIY termasuk dalam 14 Bank yang telah memenuhi persyaratan Compliance BI SNAP dengan pencapaian TO (Test Operation) sebesar 100% per November 2024.

Kemendagri menargetkan Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) terintegrasi dengan SP2D Online dan KKI akan terealisasi pada Januari 2025.

KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan plafon Rp. 928.000.000 dan Rp 9.600.000, atau sebesar 10,34%, sehingga harapannya adalah maksimalisasi penggunaan KKPD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul agar dapat melampaui penggunaan KKPD dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Kredit untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah program pemberdayaan kelompok dengan bunga 3% per tahun yang ditujukan untuk Kelompok Wanita Tani. Penyaluran Kredit untuk KWT dengan total plafon sebesar Rp 203.500.000,- (Dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Penyaluran Kredit KUR kepada sektor Pertanian dan Perikanan sebanyak 403 debitur dengan total plafon kurang lebih sekitar 28 miliar.

Penyaluran Kredit KUR Alinsinta kepada 2 debitur dengan total plafon sebesar Rp. 1.005.000.000. (Satu miliar lima juta rupiah).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hermawan Setiaji, berharap bantuan CSR tersebut dapat memberikan manfaat dan berdampak langsung untuk masyarakat. "Yang paling penting adalah bantuan apapun harus benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung untuk masyarakat," paparnya.

Dalam acara tersebut selain penyerahan CSR mobil operasional dan ambulans dari Bank BPD ke Pemkab Bantul dan Kalurahan Mangunan juga dilaksanakan penyampaian pagu indikatif bantuan keuangan Pemkab Bantul Tahun Anggaran 2025 serta diadakan Rakor Persiapan Ketahanan Pangan Nasional.

Menurut Kepala DPMK Bantul, ketahanan pangan atau kemandirian pangan atau swasembada pangan nasional merupakan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan pemerintah RI. "Pragmatik ini menjadi prioritas program antar kementerian, antar lembaga negara, termasuk Polri," pungkasnya. (Jdm).

DUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

GOW Tingkatkan Keterampilan Berkomunikasi

BANTUL (KR) - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bantul menyelenggarakan sosialisasi program kerja GOW tahun 2025 dan seminar publik speaking di Bangsal Sasanakrida Rumah Dinas Bupati Bantul. Kegiatan tersebut guna meningkatkan keterampilan berkomunikasi anggota organisasi wanita dan mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul, Selasa (3/12).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Prof Dr Purbudi Wahyuni dari UPN Veteran Yogyakarta. Ketua GOW Kabupaten Bantul, Titi Pratiwi Riyantono, mengapresiasi kehadiran para peserta yang berasal dari berbagai organisasi wanita di Bantul.

"Public speaking adalah keterampilan yang harus

diasah, khususnya bagi kita yang berperan aktif dalam organisasi. Maka diharapkan melalui seminar ini semua bisa belajar bersama dan menjadi inspirasi bagi masyarakat," harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

Kabupaten Bantul, Ninik Istitarini, mengatakan salah satu misi Kabupaten Bantul terkait pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel, program-program pembangunan di Kabupaten Bantul, salah satunya terfokus pada pemberdayaan perempuan.

(Jdm)-f



KR-Judiman

Sosialisasi program kerja GOW di Rumah Dinas Bupati Bantul.



Penyerahan Mobil Ambulans secara simbolis kepada kalurahan Mangunan



KR-Judiman

2-unit mobil yang diserahkan ke Pemkab Bantul dan Kalurahan Mangunan



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

JPS Jadi Solusi Atasi Masalah Sosial bagi Warga Miskin



KR-Istimewa

Komis D DPRD Kabupaten Sleman mengadakan rapat internal.

SLEMAN (KR) - Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki unggulan untuk mengatasi dalam mengatasi masalah sosial bagi warga miskin dan rentan miskin, yakni Jaring Pengaman Sosial (JPS). Komis D DPRD Kabupaten Sleman mendo-

rong program tersebut dioptimalkan dan anggarannya ditingkatkan.

Anggota Komis D DPRD Kabupaten Sleman H Dedie Kusuma SE mengatakan, program JPS itu diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial bagi warga

miskin dan rentan miskin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Utamanya untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan pendidikan.

"Program ini (JPS) cukup bermanfaat bagi masyarakat

Sleman. Khususnya warga miskin dan rentan miskin yang belum masuk DTKS. Biaya kesehatan dan pendidikan dapat dicover menggunakan JPS," kata Dedie.

Hingga bulan lalu, DTKS Kabupaten Sleman terdiri atas 183.709 kepala keluarga (KK) dan atau 474.009 individu. Sedangkan alokasi anggaran JPS 2024 sebesar Rp 13,3 miliar. Sementara untuk 2025 dialokasikan Rp 12,5 miliar dengan kemungkinan ada penambahan.

Dedie Kusuma SE meminta dinas sosial dan dinas kesehatan memastikan tambahan alokasi anggaran JPS pada APBD Sleman 2025. Hal itu dikarenakan saat ini masih banyak warga yang menunggak iuran premi BPJS kesehatan. Sementara mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan. "Mereka (warga yang menunggak) masuk kategori miskin

dan rentan miskin. Tapi tidak masuk DTKS sehingga tidak bisa menerima PBI BPJS Kesehatan," terang politisi dari PDI Perjuangan ini.

Alasan warga miskin dan rentan menunggak iuran BPJS karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah kesulitan. Apalagi harus menanggung iuran satu keluarga. "Bisa makan tiga kali sehari sudah bagus. Kalau masih bayar iuran satu keluarga jelas keberatan," ujarnya.

Untuk itu, Dedie meminta kepada pemerintah daerah update data DTKS secara berkala. Dengan harapan warga miskin dan rentan miskin yang masih tercecer dapat masuk DTKS. "Kami berharap warga miskin dan rentan miskin yang belum masuk DTKS, bisa segera dimasukkan. Sehingga mereka akan terkover oleh pemerintah baik kesehatan maupun pendidikannya," ujarnya.

Sedangkan alasan perlu anggaran JPS ditingkatkan karena masih banyak warga miskin dan rentan miskin yang menunggu membayar SPP sekolah. Akibatnya setelah lulus, ijazah ditahan oleh sekolah. Selain itu juga ada warga miskin yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau kuliah karena keterbatasan biaya.

"Ini masih banyak kita temukan di lapangan. Masih ada ijazah siswa yang ditahan oleh pihak sekolah karena menunggu biaya SPP. Kemudian tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya. Semuanya itu bisa diatasi dengan JPS. Makanya kami mendorong anggaran JPS ditambah lagi," kata pengusaha Gudex Berek ini.

Menurutnya, program JPS maupun jaminan sosial lainnya dari pemerintah itu untuk membantu warga miskin dan rentan miskin di bidang kesehatan maupun pendidikan.



KR-Istimewa

H Dedie Kusuma SE

Bagi masyarakat yang merasa mampu keluar dari jurang kemiskinan, diminta kesadarannya.

"Kejujuran itu penting. Kalau memang sudah keluar dari garis kemiskinan, sebaiknya tidak menerima atau mengakses bantuan pemerintah. Supaya pengguna anggaran bantuan sosial tepat sasaran yang dimanfaatkan oleh warga miskin dan rentan miskin," pesannya.

(Sni)-f